



I Komang Mahendra  
 Kesuma<sup>1</sup>  
 I Nyoman Mahaendra  
 Yasa<sup>2</sup>

## DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat ketimpangan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di provinsi NTT. Hal ini mencerminkan belum menurunnya angka kemiskinan dan belum optimalnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, diantaranya yaitu tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk secara simultan dan parsial serta variabel yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini menggunakan data panel dengan pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan. Data yang dikumpulkan sebanyak 198 pengamatan yang berasal dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT dan data time series yang diambil dari tahun 2015-2023. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan, tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan dan jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Penelitian, peningkatan program pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Alokasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran, efektif, dan sesuai rencana dapat meningkatkan tingkat pendidikan dan secara tidak langsung akan menurunkan kemiskinan. Jumlah penduduk yang esar harus doptimalkan melalui peningkatan investasi terhadap infrastruktur dan peningkatan kapasitas lapangan pekerjaan..

**Kata Kunci:** Jumlah Penduduk, Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan

### Abstract

Poverty is a major problem in Indonesia, especially in East Nusa Tenggara Province. There are inequalities in poverty levels between districts/municipalities in NTT province. This reflects that the poverty rate has not decreased and that the government has not optimised its policies in alleviating the problem of district/municipal poverty in NTT Province. There are many factors that can affect the poverty rate, including the unemployment rate, education level, and population. The purpose of this study is to simultaneously and partially analyse the effect of the unemployment rate, education level, and population, as well as the variable that has the dominant effect on the poverty rate of districts/municipalities in NTT Province. The type of research used in this study is quantitative research in the form of associative. This research uses panel data with data collection using non-participant observation. The data collected were 198 observations from 22 districts/cities in NTT Province and time series data taken from 2015-2023. This research uses descriptive statistical analysis and panel data multiple linear regression. The results of this study show that simultaneously, the unemployment rate, education level and population have a significant effect on the poverty rate. The unemployment

<sup>1,2</sup>Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana  
 email: mahendrakes159@gmail.com<sup>1</sup>

rate partially has a positive and insignificant effect, the education level partially has a positive and insignificant effect.

**Keywords:** Population, poverty, unemployment, education

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia bahkan dengan jumlah populasi penduduk yang tinggi menempatkan Indonesia di posisi ke 4 di dunia dengan total jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 280,73 Juta jiwa (Muniroh, 2023). Penduduk yang besar nyatanya tidak membuat Indonesia menjadi negara maju, sebab sampai saat ini Indonesia hanya sebagai negara berkembang. Populasi penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan kualitas penduduk itu sendiri maka hanya akan menambah permasalahan yang ada, salah satunya mengenai kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap tahun 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap tahun 2020 (Muniroh, 2023). Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 tepatnya pada tahun 2022 sebesar 9,54 persen dan pada 2023 menurun 0,18 persen menjadi, 9,36 persen (BPS Nasional, 2023). Kemiskinan adalah permasalahan yang sering dialami oleh negara -negara berkembang. Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi, sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang selalu dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia, pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki produktivitas yang rendah. Kemiskinan merupakan masalah pokok yang bersifat multisektoral, yang menyangkut berbagai sektor kehidupan masyarakat mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sampai dengan ketenagakerjaan, sehingga diperlukan kebijaksanaan yang komprehensif untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Indonesia terkenal dengan catatan tentang pengentasan kemiskinannya, tetapi garis kemiskinan nasionalnya adalah salah satu yang paling rendah di dunia. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai suatu keadaan rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu contoh provinsi yang masih menghadapi kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT menempati posisi ketiga tertinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 19,96 persen pada tahun 2023 di bawah Provinsi Papua dan Papua Barat (BPS NTT, 2024). Provinsi Papua menempati posisi pertama dengan tingkat kemiskinan sebesar 26,03 persen dan provinsi Papua Barat menempati posisi kedua dengan tingkat kemiskinan sebesar 20,49 persen. Masih tingginya angka kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Provinsi NTT membuat provinsi terus mengalami permasalahan kemiskinan. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari banyak pulau dengan akses yang terbatas dapat menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kurangnya lapangan kerja formal, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya dapat menjadi faktor penting dalam mempertahankan tingginya tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. NTT memiliki Sumber Daya Alam yang cukup besar dan beragam, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 2018-2023 (%)

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sumba Barat	28,51	28,29	28,17	28,39	27,47	27,17
2.	Sumba Timur	30,13	30,02	29,65	29,68	28,22	28,08
3.	Kupang	23,10	23,03	22,77	22,98	21,70	21,78
4.	Timor Tengah Selatan	28,06	27,87	27,49	26,64	25,45	25,18
5.	Timor Tengah Utara	22,31	22,45	22,28	22,62	21,50	21,85
6.	Belu	15,70	15,54	15,37	15,68	14,84	14,30

7.	Alor	21,63	21,59	21,09	21,09	20,25	19,97
8.	Lembata	26,45	26,30	26,14	26,21	25,18	24,78
9.	Flores Timur	11,05	10,90	10,84	11,14	10,75	11,77
10.	Sikka	13,82	13,53	13,12	13,35	12,61	12,56
11.	Ende	24,20	23,18	23,76	24,13	23,00	22,86
12.	Ngada	12,94	12,48	12,51	12,58	11,93	12,06
13.	Manggarai	20,83	20,55	20,34	20,48	19,84	19,69
14.	Rote Ndao	28,08	27,95	27,54	28,08	27,45	27,05
15.	Manggarai Barat	18,14	18,01	17,71	17,92	17,15	16,82
16.	Sumba Tengah	34,85	34,62	34,49	34,27	32,51	31,78
17.	Sumba Barat Daya	28,88	28,06	28,00	28,18	27,16	27,48
18.	Nagekeo	12,98	12,85	12,61	12,91	12,05	12,33
19.	Manggarai Timur	26,50	26,49	26,52	26,50	25,35	25,06
20.	Sabu Raijua	30,83	30,52	30,18	30,13	28,73	28,37
21.	Malaka	16,34	16,12	16,04	16,33	15,26	14,42
22.	Kota Kupang	9,61	9,22	8,96	9,17	8,61	8,61
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		<b>21,35</b>	<b>21,09</b>	<b>20,90</b>	<b>20,99</b>	<b>20,05</b>	<b>19,96</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan Tabel 1. yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa kemiskinan yang diukur dengan jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi persebarannya dimana pada tahun 2023 beberapa kabupaten/kota seperti Belu, Flores Timur, Sikka, Ngada, Manggarai Barat, Nagekeo, Malaka, dan Kota Kupang memiliki tingkat kemiskinan dibawah rata-rata kemiskinan Provinsi NTT tahun 2023, dan sisanya memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata kemiskinan Provinsi NTT tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masalah masih menjadi masalah dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk terus menggali permasalahan ini agar tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dapat menurun jumlahnya, dengan mengupayakan pemberantasan kemiskinan perlu dilakukan dengan meningkatkan SDM guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kemiskinan akan berhasil apabila pemerintah serta masyarakat ikut serta dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi seperti tercapainya pembangunan di berbagai sektor. Melalui program-program yang telah disiapkan guna menunjang kualitas SDM yang tersedia yang mampu mengasah kemampuan guna bersaing dalam kancah masyarakat dan membantu menyukseskan program pemerintahan. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi dan dipengaruhi dengan peran SDM yang tersedia di masyarakat yang diharapkan mampu ikut serta dalam keberhasilan peningkatan perekonomian.

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi NTT salah satunya adalah tingkat pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat menyebabkan bertambahnya kebutuhan ekonomi setiap orang. Semakin meningkat pertumbuhan penduduk maka semakin sedikit lapangan pekerjaan yang ada sehingga jumlah pengangguran bertambah. Pengangguran terjadi disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemiskinan dan pengangguran memiliki hubungan yang kuat, maka untuk menurunkan angka kemiskinan maka diperlukan juga penurunan pada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dapat diturunkan dengan menambah lapangan pekerjaan agar jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan seimbang.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 2018-2023 (%)

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumba Barat	4,06	3,15	3,96	1,74	2,98	3,52
2	Sumba Timur	1,42	2,13	3,49	3,35	2,61	2,21
3	Kupang	2,71	4,48	4,90	3,99	3,23	3,22
4	Timor Tengah Selatan	1,01	1,94	2,63	2,57	1,99	2,64
5	Timor Tengah Utara	0,85	1,22	4,26	3,88	3,51	1,96
6	Belu	5,26	7,19	7,42	5,35	6,00	5,45
7	Alor	4,09	3,03	3,11	2,59	2,27	2,52
8	Lembata	5,40	4,31	4,88	4,94	4,74	2,55
9	Flores Timur	4,01	3,09	3,16	3,81	3,49	3,79
10	Sikka	2,43	3,56	4,00	4,54	4,51	2,62
11	Ende	2,89	2,98	2,95	2,61	2,06	2,59
12	Ngada	2,11	3,38	4,69	2,99	2,81	4,00
13	Manggarai	3,21	3,11	4,09	3,70	3,50	2,44
14	Rote Ndao	2,11	2,73	4,90	3,67	3,64	3,65
15	Manggarai Barat	1,19	2,42	3,72	4,94	4,91	4,42
16	Sumba Tengah	3,57	3,43	4,02	1,45	1,21	1,89
17	Sumba Barat Daya	1,01	1,25	2,36	2,04	1,97	2,08
18	Nagekeo	1,88	2,76	3,09	0,97	2,97	3,54
19	Manggarai Timur	1,57	0,95	2,10	1,96	1,89	1,63
20	Sabu Raijua	2,12	2,89	3,08	1,25	3,29	4,06
21	Malaka	3,79	2,34	3,63	3,43	3,30	3,06
22	Kota Kupang	10,17	9,78	10,90	9,76	8,55	5,69
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		<b>3,01</b>	<b>3,35</b>	<b>4,28</b>	<b>3,77</b>	<b>3,54</b>	<b>3,14</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota di Provinsi NTT dari tahun 2018 hingga 2023. TPT di kabupaten/kota di Provinsi NTT tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 4,28 persen dan tahun berikutnya terus menurun. Di tahun 2020, Kota Kupang mengalami lonjakan TPT menjadi 10,9 persen, dan Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan TPT terendah sebesar 0,85 persen. Tahun 2021 Kota Kupang tetap memiliki TPT tertinggi sebesar 9,76 persen, sementara Kabupaten Sumba Tengah mencatatkan TPT terendah sebesar 1,45 persen. Pada tahun 2022, Kota Kupang masih memimpin dengan TPT tertinggi sebesar 8,55 persen, sedangkan Kabupaten Sumba Tengah mencatatkan TPT terendah di 1,21 persen. Tahun 2023 menunjukkan penurunan TPT di Kota Kupang menjadi 5,69 persen, dan Kabupaten Sikka mencatatkan TPT terendah sebesar 2,62 persen. Pemerintah NTT telah berupaya untuk menurunkan angka pengangguran agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi NTT. Pernyataan ini didukung juga dari BPS Kota Kupang (2021), menyatakan bahwa terdapat beberapa upaya yang saat ini terus diupayakan pemerintah, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, mengoptimalkan Kartu Pra-Kerja, mendorong dunia usaha agar memberikan insentif bukan PHK, memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, melatih para pengangguran yang terdidik agar bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, memberikan motivasi kepada pengangguran terutama mengubah pola pikir untuk menjadi wirausahawan, serta menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja utamanya menyangkut perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah NTT bisa dikatakan berhasil menurunkan angka pengangguran yang dibuktikan dengan menurunnya TPT di Provinsi NTT dari tahun ke tahun. Terdapat satu Provinsi yang memiliki kondisi yang sama dengan NTT, yaitu Papua akan tetapi penanggulangan tingkat kemiskinan di Papua lebih terorganisir dibandingkan dengan Provinsi

NTT. Berdasarkan data dari BPS Papua (2023), TPT di Provinsi Papua sebesar 2,67 persen, turun sebesar 0,16 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Bintang & Woyanti (2018) tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan yang berpengaruh positif dan signifikan. Studi lain oleh Ariasih & Yuliarmi (2021) juga menemukan bahwa hal itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan penduduk, karena dalam pembangunan sangat di perlukan partisipasi penduduk yang terdidik serta terampil agar dapat ikut berpartisipasi penuh dalam sebuah pembangunan suatu daerah.

Tabel 3. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 2018-2023 (Tahun)

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumba Barat	6,52	6,53	6,60	6,84	6,85	6,92
2	Sumba Timur	6,74	6,86	7,12	7,32	7,33	7,57
3	Kupang	7,11	7,37	7,38	7,39	7,41	7,42
4	Timor Tengah Selatan	6,47	6,72	6,73	6,74	6,76	6,97
5	Timor Tengah Utara	7,26	7,51	7,81	7,96	7,97	8,16
6	Belu	7,08	7,11	7,35	7,36	7,38	7,39
7	Alor	7,81	8,09	8,41	8,42	8,43	8,45
8	Lembata	7,95	8,21	8,22	8,23	8,25	8,26
9	Flores Timur	7,42	7,70	7,71	7,72	7,79	8,04
10	Sikka	6,69	6,71	6,94	6,95	6,96	6,98
11	Ende	7,79	7,80	7,81	8,03	8,09	8,20
12	Ngada	8,07	8,37	8,52	8,53	8,54	8,82
13	Manggarai	7,26	7,27	7,37	7,61	7,62	7,63
14	Rote Ndao	7,24	7,29	7,59	7,71	7,76	7,82
15	Manggarai Barat	7,18	7,19	7,30	7,56	7,80	7,94
16	Sumba Tengah	5,76	5,96	6,25	6,47	6,73	7,00
17	Sumba Barat Daya	6,32	6,33	6,34	6,35	6,37	6,38
18	Nagekeo	7,82	7,83	7,89	7,90	7,91	8,14
19	Manggarai Timur	6,65	6,87	7,08	7,35	7,42	7,70
20	Sabu Raijua	6,06	6,33	6,65	6,66	6,77	6,98
21	Malaka	6,60	6,86	6,87	7,10	7,12	7,13
22	Kota Kupang	11,46	11,47	11,58	11,60	11,61	11,62
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		<b>7,30</b>	<b>7,55</b>	<b>7,63</b>	<b>7,69</b>	<b>7,70</b>	<b>7,82</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini tentunya membawa dampak baik terhadap kualitas sumber daya manusia di NTT. Pendidikan juga memiliki kontribusi yang besar karena dapat menjadi investasi sumber daya manusia di NTT untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan merupakan bentuk investasi individu, di mana jika semakin tinggi pendidikan, maka kesejahteraan suatu individu akan meningkat dan hal ini juga akan mempengaruhi jangka panjang kesejahteraan ekonomi suatu negara. Selain itu pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dimana kenaikan kualitas pendidikan akan menurunkan kemiskinan (Mustakim, 2022). Pada tahun 2023 beberapa kabupaten/kota seperti Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, dan Malaka memiliki rata-rata lama sekolah dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi NTT tahun 2023, dan kabupaten/kota lainnya memiliki rata-rata lama sekolah diatas rata-rata lama sekolah Provinsi NTT tahun 2023

Faktor lainnya yang menyebabkan kemiskinan adalah Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang positif dengan kata lain jika jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan akan meningkat (Usman, 2018). Selain itu pertumbuhan penduduk juga dapat berdampak positif apabila dapat membantu pembangunan ekonomi, akan tetapi jumlah penduduk menghambat perekonomian hal tersebut akan berdampak negatif. Terjadi penurunan pada tahun 2021 dan terjadi peningkatan pada tahun 2022, tingginya jumlah

penduduk pada tahun 2022 yang bahkan mencapai 5.466.285 jiwa dan pada tahun 2023 yang mencapai 5.569.068 bisa menjadi penyebab terjadinya kemiskinan ataupun hal yang dapat mengurangi kemiskinan. Bertambah atau berkurangnya kemiskinan bergantung pula pada lapangan kerja yang tersedia. Namun faktanya lapangan kerja di NTT masih kurang sehingga jumlah penduduk yang tinggi ini justru menyebabkan peningkatan pada penduduk miskin di Provinsi NTT. Kemiskinan adalah salah satu faktor dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi NTT.

## **METODE**

Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif berbentuk asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:55), penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebabakibat, salah satu variabel (independent) mempengaruhi variabel yang lain (dependent). Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Secara Simultan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT**

Berdasarkan hasil analisis, variabel Tingkat Pengangguran ( $X_1$ ), Tingkat Pendidikan ( $X_2$ ) dan Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hasil ini memiliki makna bahwa Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk dapat mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Rastogi (2002) menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi pendapatan mereka. Dalam konteks ini, peningkatan tingkat pendidikan ( $X_2$ ) memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Ketika individu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, mereka cenderung menjadi lebih produktif dan memiliki akses ke pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Secara Parsial Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT**

#### **1) Pengaruh Tingkat Pengangguran Secara Parsial Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT**

Berdasarkan hasil analisis variabel tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan diperoleh bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sejalan dengan teori ekonomi regional (Sjafrizal, 2008) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak selalu secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023) dan penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2017) dimana tingkat pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu yang mencari kerja, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang terakhir yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

#### **2) Pengaruh Tingkat Pendidikan Secara Parsial Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT**

Berdasarkan hasil analisis variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan diperoleh bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Masyarakat di kabupaten/kota provinsi NTT memiliki kemampuan untuk memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat mengurangi kemiskinan yang dirasakan.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Salsabil (2023) dan Berliani (2021) dimana tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat

kemiskinan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi modal penting bagi manusia yang harus ditingkatkan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan melalui peningkatan pendidikan dapat menumbuhkan keahlian dan keterampilan dalam membuka kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan.

### 3) Pengaruh Jumlah Penduduk Secara Parsial Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Berdasarkan hasil analisis variabel jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan diperoleh bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk merupakan masalah yang mendasar dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, karena pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan bisa mengakibatkan tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai misalnya tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan manusia.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Zakiah, *et al.*, (2023) dan Agustina, *et al.*, (2018) dimana jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan yang negatif antara jumlah penduduk tingkat kemiskinan disebabkan karena penduduk bukanlah masalah utama dalam kemiskinan. Jumlah penduduk yang tinggi di Provinsi NTT dapat memberikan pengaruh yang negatif sehingga tingkat kemiskinan mengalami penurunan meskipun tingkat pendidikan penduduknya masih rendah. Hal ini dikarenakan populasi yang tinggi dapat memberikan pasar domestik yang luas, dimana jika dikelola dengan baik melalui pemberdayaan ekonomi dan distribusi sumber daya yang adil, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

### Variabel yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, diketahui tingkat pendidikan memiliki nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan koefisien tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan paling dominan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Peningkatan tingkat pendidikan dapat membuka akses ke peluang kerja yang lebih baik, meningkatkan keterampilan, dan memungkinkan individu untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi.

### Implikasi Penelitian

Penelitian ini membahas hubungan antara tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun beberapa daerah, seperti Sumba Barat, Belu, dan Kota Kupang, memiliki tingkat pengangguran tinggi, hal ini tidak secara langsung mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan program pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal serta kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Anggaran pendidikan yang tinggi di beberapa daerah, seperti Timor Tengah Selatan, Flores Timur, dan Kupang, menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat membantu mengurangi kemiskinan. Namun, beberapa kabupaten seperti Sumba Barat dan Sumba Tengah memiliki anggaran pendidikan rendah, yang mencerminkan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan secara merata. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan lokal juga perlu diperkuat untuk menurunkan kemiskinan.

Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun jumlah penduduk yang besar cenderung meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi, di NTT, jumlah penduduk yang tinggi justru dapat berpotensi menurunkan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Data Gini Ratio menunjukkan bahwa beberapa daerah dengan populasi besar, seperti Manggarai Timur dan Sumba Timur, memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang fokus pada pengelolaan pertumbuhan populasi yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan distribusi sumber daya yang lebih adil sangat penting untuk mengurangi kemiskinan di wilayah ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini memiliki makna bahwa tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk, dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi NTT.
- 2) Tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan, jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini memiliki arti bahwa tingkat pengangguran dan jumlah penduduk tidak berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan kemiskinan, sedangkan apabila variabel tingkat pendidikan meningkat, maka variabel tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan di kabupaten/kota di Provinsi NTT.
- 3) Tingkat pendidikan merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh". *Jurnal Perespektif Ekonomi Darussalam*,4(2), 265-283.
- Annur, A. R. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal* 2(4): 409–426
- Astuti, I. W., Ratnasari, V., dan Wibowo, W. (2017). Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Sains dan Seni Its* 6(1): 150–156
- Ariasih, N. L. M., & Yuliarimi, N. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Indonesia Cerdika* 1(7): 807–825
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2009). *Statistik Indonesia 2009*. Diakses pada <https://www.bps.go.id/publication/2009/08/15/e53bddadbcfbaaf460cc1582/statistik-indonesia-2009.html>
- \_\_\_\_\_. (2010). *Data dan Informasi Kemiskinan*. Pada <https://www.bps.go.id/publication/2010/12/23/b0adeb45e05c3db10ac99f33/statistik-indonesia-2010.html>
- \_\_\_\_\_. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Diakses pada <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2023*. Diakses pada <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- \_\_\_\_\_. (2024). a *Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2018-2023*. Diakses pada <https://ngadakab.bps.go.id/statistics-table/2/MjIzIzI=/gini-rasio-kabupaten-kota-provinsi-nusa-tenggara-timur.html>
- \_\_\_\_\_. (2024). b [Metode Baru] *Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2018-2023*. Diakses pada <https://ntt.bps.go.id/indicator/26/49/1/-metode-baru-rata-rata-lamanya-sekolah-menurut-kabupaten-kota.html>
- \_\_\_\_\_. (2024). c [Seri 2010] *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2020 Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2015-2023*. Diakses pada <https://ntt.bps.go.id/indicator/156/455/1/-seri-2020-laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html>
- \_\_\_\_\_. (2024). d *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2023*. Diakses pada <https://ntt.bps.go.id/indicator/6/522/2/tingkat-pengangguran-terbuka-tp-t-menurut-kabupaten-kota.html>

- \_\_\_\_\_.(2024). e Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2023. Diakses pada <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIwIzI=/total-area-by-regency-city.html>
- \_\_\_\_\_.(2024). f Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2023. Diakses pada <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIwIzI=/total-area-by-regency-city.html>
- \_\_\_\_\_.(2024). g Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Diakses pada <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg4IzI=/proyeksi-penduduk-menurut-kabupaten-kota-prov-ntt.html>
- \_\_\_\_\_.(2024). i Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2023. Diakses pada <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTMwMSMx/banyaknya-pekerja-migran-indonesia--pmi--ke-luar-negeri-menurut-asal-kabupaten-kota-dan-pendidikan-terakhir-yang-ditamatkan-di-provinsi-nusa-tenggara-timur--2023.html>
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. (2023). Buku Pedoman Penulisan dan Pengujian Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana
- Ferezagia, V. D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1(1): 1-6
- Fujiyati, One Yunita, Sukadi. (2015). Sistem Informasi Pengolahan Data Kependudukan Desa Purwosari. *Jurnal Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi* 7(1): 1-8
- Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS (Edisi 3). Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro
- Gujarati, D., dan Porter, D. C. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika (Buku2). (Terj.) Raden Carlos Mangunson. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, A., dan Wachidah, L. (2023). Metode Regresi Elastic-Net untuk Mengatasi Masalah Multikolinieritas pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. *Bandung Conference Series: Statistics* 3(1): 66-72
- Hanny, H. I., dan Islamiyati, D. (2020). Pengaruh ZIS dan Faktor Makroekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi* 25(1): 118-131
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4(1): 1-12
- Kakisina, S. C. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 7(2): 43-52
- Khatimah, H. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin.
- Krisliani, P., dan Setyari, W. (2021). Determinan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E -Jurnal EP Unud* 10(6): 2545-257
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2024). SIRUP LKPP.
- Nadziroh, N. dan Karim, A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Karakter Siswa Kelas V SDN Mlilir 01 Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Waspada* 3(1) 20-30
- Nurhasanah, Syafri, M., dan Edi, K. J. (2019). Analisis pengaruh tingkat Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 8(3): 161-169
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15(2): 184-192
- Parwa, A. L. J. dan Yasa, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud* 8(5): 945-973
- Pradnyadevi, K. Dan Wenagama. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Investasi, dan pertumbuhan ekonomi Terhadap Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ep Unud* 11(02): 469-494

- Rastogi, P. N. (2002). Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation. *Human Systems Management*, 21(4).229-240.
- Rasyid, A., dan Sa'roni, C. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 6(2): 663-670
- Renna, P. R. H. (2022). Konsep Pendidikan Menurut John Locke dan Relevansinya bagi Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Pedalaman Papua. *Jurnal Papeda* 4(1): 7-16
- Reza, W. P. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Penempatan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan. *JOM Fekon* 4(1): 426-437
- Rianda, N. C. (2020). Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Individual. *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12(1): 17-26
- Silastri, N. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fekon* 4(1): 105-117
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.
- Sudarsono, A. (2016). Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Bacpropogation (Studi Kasus di Kota Bengkulu). *Jurnal Media Infotama* 12(1): 61-69
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
- Supriatna. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Harmoniora Utama Press
- Susanto, R. dan Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 5(4): 340-350
- Tervia, S., Rositawati, D. F. A., dan Fitri. (2022). Pemodelan Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tpt Provinsi Tertinggi di Indonesia Sebagai Dampak dari COVID-19. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik* 14(2): 17-30
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan)*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Economic Development*. Jakarta: Erlangga.
- Trisnu, P. S. G. C., & Sudiana, K. I. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi NTT. *E-Jurnal Ep Unud* 8(11): 2622-2655
- Usman, U., & Mita, D. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2): 46.
- Yoga, A. (2017). *Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana Zis dan Variabel Makroekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di 12 Provinsi Indonesia Periode 2012-2016)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta